

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ilmu mengenai hubungan internasional yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan membuat penulis memiliki ketertarikan terhadap perkembangan dan dinamika ekonomi-politik terutama di kawasan Asia Timur. Asia Timur merupakan sebuah kawasan strategis dalam dunia internasional sebab adanya beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor geografis, geopolitik, dan geostrategi yang menjadi perhatian tersendiri bagi negara-negara maju. Konflik di Korea selanjutnya dipilih dalam penelitian ini karena perang Korea yang berlangsung sejak tahun 1950 hingga tahun 1953 masih berkelanjutan dengan masih adanya perselisihan diantara kedua negara yang bersebelahan ini dan melibatkan Amerika. Perselisihan tersebut masih berlanjut karena kepemilikan senjata pemusnah masal oleh Korea Utara. Sehingga konflik diantara kedua negara ini tak kunjung reda.

Selain itu, pokok kajian yang akan diteliti penulis sesuai dengan konsentrasi yang dipilih oleh penulis yaitu studi ekonomi-politik internasional atau *multi national corporations* (MNC). Ini menjadi penting karena isu ekonomi dan politik dalam skala regional maupun internasional saling berkaitan. Terlebih kebijakan Amerika Serikat dalam merespon konflik yang terjadi dalam sudut pandang ekonomi-politik.

Oleh karenanya penulis mengajukan judul dalam penelitian mengenai konflik yang berada di kawasan Asia Timur tersebut. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Perdagangan Senjata Amerika Serikat Dalam Konflik Korea”** untuk diteliti dan dijadikan topik dan bahan dalam proses penyusunan skripsi.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat memiliki kekuatan ekonomi, militer, politik, dan teknologi yang cukup mumpuni. Dengan kemampuan itu, Amerika Serikat kerap melakukan tindakan hegemoni demi mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam sistem internasional, interaksi antar negara umumnya dilandasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai. Terkadang intervensi, embargo ekonomi, hingga invasi ke suatu negara akan diterapkan dalam pengambilan kebijakan.

Kepentingan luar negeri Amerika Serikat adalah memperluas pengaruh demokrasi-liberalisasi ke dalam sistem internasional seperti yang diungkapkan oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-28.¹ Sebagai negara adikuasa Amerika sering bertindak unilateral dan terkadang menggunakan instrumen militer dalam mengintervensi negara lain. Diantaranya adalah keterlibatan Amerika dalam perang Vietnam, invasi yang dilakukan Amerika ke Afganistan, agresi militer ke Irak, maupun intervensi ke Suriah.

Perang saudara yang terjadi antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara melibatkan Amerika di dalamnya. Dalam konflik saudara ini kebijakan luar negeri yang digunakan Amerika dalam membantu Vietnam Selatan adalah memilih kebijakan intervensi. Kebijakan ini dipilih Amerika untuk membantu Vietnam Selatan mempertahankan wilayahnya tahun 1960-1975. Secara sepihak, Amerika meledakkan kawasan perairan Teluk Tonkin yang dianggap sebagai lokasi pangkalan laut dan instalasi vital musuhnya. Vietcong atau rezim Vietnam Utara merespon tindakan Amerika tersebut dengan melakukan serangan balasan secara mendadak pada hari raya Tet² akhir Januari 1968. Dalam serangan tiba-tiba tersebut, kekuatan militer Amerika Serikat tidak sanggup melawan gerilyawan Vietcong

¹ Mustarom, K. *Demokrasi Sebagai Alat Hegemoni*. Lembaga Kajian SYAMINA. Edisi XI, April 2014, hal 1

² Hari raya Tet adalah perayaan tahun baru tradisional Vietnam.

yang sudah menguasai wilayah Kedutaan Besar Amerika di Saigon selama 6 jam dan menewaskan hingga 300 pasukan Amerika.

Keterlibatan Amerika dalam konflik juga terjadi pada tahun di tahun 1979. Amerika Serikat mempersenjatai kelompok Mujahidin Afghanistan untuk membantu mengusir tentara Uni Soviet yang memporak-porandakan Afghanistan. Bantuan yang diberikan Amerika itu mampu mengusir militer Uni Soviet, namun veteran Mujahidin Afghanistan justru berubah menjadi kader gerakan islam ekstrimis. Sebagian dari mereka terlibat dalam insiden teror anti Barat yaitu dalam aksi penabrakkan pesawat ke gedung World Trade Center pada 11 September 2001. Atas peristiwa ini terjadi pergeseran paradigma keamanan nasional Amerika dan dunia internasional. George Washington Bush yang kala itu sebagai Presiden Amerika menuduh Al-Qaeda sebagai aktor dibalik peristiwa tersebut. Presiden Bush memerintahkan militernya melakukan penyerangan di wilayah kekuasaan Al-Qaeda.

Aksi ini berlanjut di tahun 2003, ketika Amerika melakukan agresi militer terhadap Irak yang diduga memiliki senjata pemusnah massal. Agresi ini dianggap sebagai perpanjangan dari perang melawan teror atas dugaan keterlibatan Irak pada tragedi WTC. Amerika menuduh Saddam Hussein melindungi teroris serta diduga memiliki senjata pemusnah massal. Menteri Pertahanan Amerika, Donald Rumsfeld, menganjurkan penggunaan instrumen militer terhadap Saddam Hussein yang melindungi teroris. Dalam agresi ini, Amerika merealisasikan doktrin *preemptive strike* yaitu doktrin yang membenarkan Amerika menghancurkan pihak manapun yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya.³

Amerika juga terlibat dalam intervensi ke Suriah. Sikap pemerintah Suriah yang menggunakan kekerasan untuk menyerang rakyatnya mengundang reaksi dunia internasional. Proses penurunan rezim Bashar Al-Assad berlangsung sejak Maret 2011 telah menelan ribuan nyawa. Di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama,

³ Wulandari, Dewi Ayu. *Agresi Amerika Serikat Terhadap Irak Periode 2003-2010*. Jurnal Hubungan Internasional, Volume 1, Nomer 2, Tahun 2015, hal 134

Amerika mengambil sikap tegas tidak mendukung Bashar Al Assad untuk tetap memimpin Suriah. Penolakan ini ditunjukkan dalam pidato kepresidennya bulan Agustus 2011. Bahkan Presiden Obama mengeluarkan *Executive Order* tentang perintah larangan warganya melakukan kerjasama dengan Suriah.

Penyerangan Amerika Serikat ke beberapa negara tersebut mempertegas sikap arogansi dan kebijakan unilateral negaranya. Termasuk dalam upaya Amerika melawan aksi terorisme. Bahkan Amerika menyebutkan kawasan Irak, Iran, dan Korea Utara sebagai *axis of evil* atau poros setan yang mengancam dunia. Korea Utara termasuk di dalamnya karena memiliki senjata pemusnah massal yang menjadi ancaman bagi negara lain. Kepemilikan senjata pemusnah massal oleh suatu negara tentu sangat mengkhawatirkan dan mengakibatkan rawan terjadinya konflik.⁴ Termasuk konflik yang terjadi di Korea.

Konflik Korea menjadi sorotan banyak negara karena penggunaan senjata pemusnah massal oleh Korea Utara yang berusaha menginvasi Korea Selatan. Korea Utara sering melakukan uji coba rudal yang memicu ketegangan kawasan internasional. Program pengembangan reaktor nuklir yang tidak transparan oleh rezim Pyongyang⁵ mengakibatkan berbagai reaksi negara lain termasuk Amerika. Dalam menghadapi ancaman Korea Utara, Pemerintah Korea Selatan memperkuat pertahanan militernya dengan beraliansi ke Amerika Serikat. Kehadiran militer Amerika ini menghasilkan rasa aman bagi Korea Selatan. Kerjasama militer Korea Selatan dan Amerika tersebut mendapat kecaman dari Korea Utara. Disamping itu, Amerika sesungguhnya khawatir apabila Korea Utara mengeksport teknologi rudal ke sekutunya yang tidak bersahabat dengan Amerika.

⁴ Purwono, Andi, dkk. Peran Nuklir Korea Utara sebagai Instrumen Diplomasi Politik. Semarang (2010) : SPEKTRUM, hal 3

⁵ Rezim Pyongyang adalah rezim komunis di Korea Utara yang masih eksis hingga ke masa kepemimpinan Kim Jung Un

Upaya menghentikan program nuklir Korea Utara dilakukan Amerika melalui beberapa perundingan seperti kesepakatan untuk menghentikan program pengembangan nuklir. Amerika Serikat bersama negara lain membantu memenuhi kebutuhan energi Korea Utara dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/ NPT*) tahun 1985. Pemerintah Amerika meminta Korea Utara menerima tim *International Atom Energy Assosiation* (IAEA) pada Januari 1994 untuk melakukan inspeksi program nuklirnya. Inspeksi tersebut ditolak dan Korea Utara melakukan uji coba peluru kendali jarak jauh dan mengancam akan keluar dari NPT.

Diplomasi damai yang dipelopori Jimmy Carter menghasilkan *Agreed Framework* pada 21 Oktober 1994. Kesepakatan tersebut membahas mengenai bantuan ekonomi dan energi Amerika ke Korea Utara sebagai timbal balik penutupan reaktor nuklir di Yongbyon. Dalam upaya penutupan reaktor nuklir dan menggantinya dengan reaktor air dalam skema KEDO (*The Korean Peninsula Energy Development Organization*) di tahun 1995. Program pembangunan reaktor air ini dimanfaatkan Korea Utara untuk menghidupkan kembali fasilitas nuklir Yongbyon.

Korea Utara kembali meningkatkan program nuklirnya karena pernyataan Presiden Bush yang menyebut Korea Utara dalam *axis of evil*. Amerika kembali melakukan perundingan dalam *Six Party Talks* yang melibatkan Korea Selatan, Cina, Jepang, dan Rusia. Perundingan ini dilakukan selama enam periode dan Cina sebagai fasilitator tempat perundingannya. Putaran pertama tersebut berlangsung bulan Agustus 2003 di Beijing. Selama lima putaran perundingan ini belum menghasilkan resolusi apapun. Pada putaran ke enam tahun 2007, Pyongyang setuju untuk menutup reaktor nuklir.

Amerika adalah negara yang paling agresif dalam merespon kebijakan uji coba rudal Korea Utara. Dalam setahun Kim Jong Un telah membunuh sekitar 70 pejabat pemerintahan termasuk pamannya. Korea Utara menganggap program nuklirnya mampu mendapatkan bantuan dari negara lain. Program nuklirnya juga digunakan dalam kebijakan luar negeri untuk tujuan damai apabila

dihentikan maka akan memengaruhi kestabilan negaranya. Presiden Donald Trump melontarkan sindiran kepada Kim Jong Un sebagai *The Little Rocket Man* pada 23 September 2017⁶ melalui akun twiternya.

Kebijakan luar negeri yang dipilih Amerika dalam menghadapi Korea Utara tidak menggunakan *hardpower* seperti yang diterapkan ke negara lain dan lebih menggunakan kebijakan *softpower* berupa perundingan-perundingan damai. Kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara dalam kasus ini tentu menimbulkan pertanyaan. Terlebih karena Amerika tidak menggunakan strategi *preemptive strike*⁷ padahal Korea Utara mengembangkan dan memiliki reaktor nuklir. Sebagai negara adikuasa dan kemampuan hegemoni yang didukung militer kuat, seharusnya Amerika mampu mempengaruhi kebijakan Korea Utara sehingga mampu menstabilkan kawasan Asia Timur.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis kemudian mempertanyakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

“Mengapa Amerika Serikat tidak melakukan serangan militer terhadap Korea Utara?”

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff dalam tulisannya yang berjudul *Contending Theories Of International Relations*, yaitu tentang teori *Security Dilemma* atau Dilema

⁶ <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/911789314169823232?lang=en>

⁷ R. Harisasongko, Aditia. *Diplomasi Amerika Serikat terhadap Korea Utara dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Nuklir di Semenanjung Korea*. Universits Airlangga, hal 201

Keamanan. Penggunaan konsep Pragmatisme oleh William James dan konsep *Military Industrial Complex* juga akan dioperasionalisasikan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian.

1. Dilema Keamanan (*Security Dilemma*)

Teori ini berbunyi “*if each state arms against one or more other states, the result is a ‘security dilemma’*”.⁸ Negara yang meningkatkan kekuatan militer untuk melindungi kedaulatannya dianggap melakukan upaya penyerangan. Sehingga negara sekitar kawasan mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan pertahanan. Negara merasa terancam jika tidak meningkatkan kemampuan militer, namun meningkatkan kemampuan militer cenderung dianggap melakukan perlombaan senjata. Negara merasa terancam dan takut akan diserang negara lain yang dianggap militernya lebih kuat dan negara berupaya bekerjasama dengan negara yang dianggap kekuatan pertahanan lebih kuat dan mampu mengimbangi negara yang memberi ancaman tersebut.

Faktanya dilema keamanan tidak memberikan dampak dalam keamanan dunia. Kondisi perlombaan senjata atau *arm races* antar negara mencapai puncak apabila salah satu negara tidak mempunyai kemampuan lagi menambah atau mempercanggih militer dan persenjataannya. Negara yang lebih kuat militernya akan menyerang negara musuh yang kapabilitas militernya lebih lemah dari kekuatannya. Sehingga fenomena perlombaan senjata dalam hubungan antar negara ini akan membawa situasi yang lebih rumit yaitu perang.

Proses aksi-reaksi ini terus terjadi dan sepertinya tidak dapat dicegah maupun dihentikan. Seperti dilema keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur dan dalam kasus tertentu melibatkan Amerika Serikat sebagai negara yang berada di luar kawasan. Kepemilikan senjata pemusnah massal Korea Utara dianggap sebagai ancaman oleh negara lain. Merujuk pada teori ini, kebijakan Korea Utara dalam

⁸ Dougherty, James E., JR, Robert L. Pfaltzgraff. *Contending Theories of International Relations*. Addison Wesley Longman, Inc. (2001). Edisi 5, hal 64

mengembangkan program senjata pemusnah masal ditujukan untuk pertahanan dan keamanan regionalnya. Namun, upaya tersebut mengundang reaksi negatif dari negara-negara di kawasan Asia Timur.

Dilema keamanan dialami Korea Selatan dalam menentukan kebijakan pertahanannya. Apabila tidak meningkatkan pertahanan militer, maka sewaktu-waktu Korea Utara melakukan penyerangan, Korea Selatan tidak dapat mengimbangi militernya. Upaya untuk meningkatkan pertahanan negara akan menimbulkan dampak perlombaan senjata bagi negara lain. Tindakan serupa juga akan dilakukan negara lain dengan peningkatan pertahanan kedua negara tersebut. Aksi ini akan terus berlanjut dan menimbulkan efek domino.

2. Konsep Pragmatisme

William James menjelaskan pragmatisme yang berbunyi “pragmatism is willing to take anything, to follow either logic or the senses, and to count the humblest and most personal experiences”⁹. Dalam pandangannya ini, James menjelaskan bahwa pragmatisme mengikuti logika atau pandangan individu dalam melakukan suatu hal dengan menghitung keuntungan yang akan didapat. Konsep pragmatisme ini berkembang di Amerika dan digunakan sebagai the way of life bangsa Amerika dalam memengaruhi sikap politik luar negeri mereka melalui diplomasi politik yang pragmatis. Pragmatisme ini menimbulkan inkonsisten yang lahir karena adanya keyakinan sesuatu yang terjadi belum mencapai tahap akhir sehingga mampu membuka peluang demi mendapatkan keuntungan. Pragmatisme Amerika mencerminkan ideologi Amerika sebagai negara liberalisme.

Dalam konsep ini, keterlibatan Amerika dalam konflik Korea tidak menggunakan kebijakan unilateral maupun *preemptive-strike* seperti yang dilakukan pada kasus-kasus sebelumnya. Berdasarkan

⁹ Dikutip dari jurnal Rizqiyanto, Saomi. Kesepakatan Geneva Sebagai Bentuk Pragmatisme Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. EDU, hal 5

pengalaman yang dilakukan Amerika dalam kasus Vietnam, Afganistan, Irak, serta Suriah, Amerika seolah membiarkan konflik Korea tetap terjadi dan tidak upaya melakukan *preemptive-strike* untuk menghentikan konflik. Kondisi yang terjadi di Korea ini dianggap sebagai peluang oleh Amerika untuk mendapat keuntungan dengan melakukan kerjasama ke negara-negara yang merasa terancam. Bagi Amerika, yang terpenting adalah bagaimana kepentingan nasionalnya dapat diraih dalam situasi konflik maupun damai.

3. Konsep *Military Industrial Complex* (MIC)

Daniel Guérin menjelaskan *Military Industrial Complex* sebagai "koalisi kelompok tak resmi dan berubah-ubah yang memiliki kepentingan psikologis, moral, dan material terhadap kelangsungan pengembangan dan pengelolaan senjata canggih, perlindungan pasar kolonial, dan urusan dalam negeri yang strategis secara militer".¹⁰

Konsep ini muncul sebagai akibat dari adanya fenomena kelompok kepentingan elit Amerika Serikat yang kelangsungan hidup kelompok tersebut bergantung dengan industri militer. Industri militer ini mengupayakan agar penjualan senjata antar negara terus meningkat. Para pedagang senjata ini mendapat komisi besar dari kebijakan luar negeri pemerintah Amerika.

Dimana Pemerintah Amerika Serikat melakukan aliansi perdagangan senjata untuk tujuan pertahanan di negara konflik maupun negara damai. Pihak yang diuntungkan bukanlah publik Amerika, melainkan korporasi yang menginginkan industri senjata terus meningkat. Bahkan lini tertinggi dalam pemerintahan juga bertindak dalam membantu upaya penjual senjata dan memenangkan kontrak di luar negeri.

Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Amerika dan korporasi persenjataan Amerika ini sengaja untuk memelihara dan

¹⁰ Mill, John Stuart. *Military Industrial Complex*. Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics. Hal 1999

membangkitkan konflik di berbagai negara agar industri persenjataan mereka tetap memperoleh untung besar. Dengan adanya konflik di negara, secara tidak langsung Amerika akan mempromosikan kecanggihan senjata yang dimiliki. Dengan begitu negara lain akan melihat kemampuan senjata Amerika.

Dalam konsep ini, situasi *arm races* yang terjadi di kawasan Asia Timur dimanfaatkan oleh para korporasi elit untuk mendapatkan keuntungan dari konflik yang terjadi dengan mengupayakan adanya kontrak dengan pemerintah negara lain untuk melakukan kerjasama militer. Dana pemerintah yang didapat dari hasil perdagangan ini akan diberikan pula kepada korporasi industri senjata. Sehingga korporasi tersebut akan mendapat dana dari adanya konflik.

E. Hipotesa

Amerika Serikat membiarkan konflik Korea tetap ada karena kepentingan menjaga kelangsungan hidup industry senjata Amerika Serikat.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi di Korea.
2. Pasang surut denuklirisasi Korea Utara oleh Amerika Serikat.
3. Membuktikan bahwa Amerika Serikat melihat adanya peluang ekonomi dalam konflik di Korea.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih

karena penelitian kualitatif mampu dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan politik. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia maka penelitian ini hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, serta sumber lain yang valid dan terpercaya. Dimana dalam masalah tersebut akan diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini akan terbagi dalam empat bab.

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah dalam penelitian ini menjelaskan mengenai tindakan Amerika Serikat yang selalu melakukan intervensi dalam tiap konflik negara. Beberapa tindakan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke negara lain juga dipaparkan secara singkat dalam bab pertama.
- Bab II : Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Bagian ini akan menjelaskan mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat, modal ekonomi militer, dan hegemoni Amerika.
- Bab III : Dinamika Konflik Korea. Bab ini akan menjelaskan mengenai perang yang terjadi di Korea tahun 1950-1953, perundingan denuklirisasi Korea Utara, dan keterlibatan Amerika dalam konflik Korea.
- Bab IV : Analisa Hipotesa. Bagian ini akan berisi pembuktian hipotesa bahwa Amerika memanfaatkan peluang perdagangan dibalik konflik Korea.
- Bab V : Kesimpulan. Bagian ini akan berisi kesimpulan dari pembahasan masing-masing bab.